

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Bank Umum Syariah**

###### **a. Pengertian Bank Syariah**

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syari'ah atau disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas bank umum syari'ah dan bank pembiayaan rakyat syari'ah.

###### **b. Ciri-ciri Bank Syariah**

Bank Syari'ah dalam mekanisme operasionalnya sangat jauh berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah mempunyai ciri atau karakter tersendiri, antara lain:

###### **1. Berdimensi Keadilan dan Pemerataan**

Bukti berdimensi keadilan dalam bank syariah adalah sistem bagi hasil. Cara seperti ini akan berimplikasi bahwa jika kerugian

terjadi, maka dia tidak hanya ditanggung oleh satu pihak karena risiko kerugian dan keuntungan ditanggung bersama.<sup>24</sup>

Dengan demikian, secara tidak langsung perekonomian umat akan terwujud secara merata dalam bentuk penyebaran modal dan kesempatan berusaha, sesuai dengan ajaran Islam.

## 2. Bersifat Mandiri<sup>25</sup>

Karena prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam negara maupun dunia internasional. Bank syariah dengan sendirinya tidak bergantung kepada gejolak moneter sehingga bisa bergerak tanpa dipengaruhi.

Keadaan seperti ini tentu sangat berbeda dengan bank konvensional yang dalam operasinya menggunakan asas bunga, sehingga harus memperhatikan tingkat inflasi dalam negara dan tingkat bunga riil di luar negara serta persaingan dalam negara.

## 3. Persaingan Secara Sehat<sup>26</sup>

Bentuk persaingan yang berlaku di antara bank syariah adalah masing-masing berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah dan bukan

---

<sup>24</sup>Syuri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 54. Dikutip dari kamal Khir, dkk. (2008), *op.cit.*, hlm. 11; Abdur Raqib (2007), *Principle & Practice of Islamic Banking*, Dhaka: Panam press Ltd., hlm. 74.

<sup>25</sup>Syukri Iska, *Sistem perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 54-55.

<sup>26</sup>*Ibid.*

saling mencari kelemahan dan mematikan serta memburuk-burukan yang lain.

#### 4. Adanya Dewan Pengawas Syariah<sup>27</sup>

Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah lembaga yang bersifat independen, yang dibentuk sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan di bank yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan syariah. DPS berfungsi sebagai pengawas, penasihat, dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan cabang syariah.

#### 5. Biaya biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang nilainya tidak kaku dan bisa dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar dalam batas yang dibenarkan. Biaya biaya tersebut hanya dikenakan berdasarkan batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sisa utang setelah habis masa kontrak akan diselesaikan pada kontrak yang baru.<sup>28</sup>

#### c. Pengertian Bank Umum Syari'ah

Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>29</sup> Bank ini ada yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi* (UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2017), hlm. 168.

berdiri dari awal memang berupa bank umum syari'ah dan ada juga yang didirikan dengan melepaskan diri dari induk konvensional.

Dalam bank ini, modal dan pengelolaannya tidak ada hubungannya dengan bank induk konvensional.<sup>30</sup> Bank Umum Syari'ah merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional, maka dari itu seperti halnya Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syari'ah dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa.

d. Landasan Hukum Operasional Bank Umum Syari'ah<sup>31</sup>

. Bank Syari'ah adalah bank yang berasaskan antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*);
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;  
dan
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 171-172.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman;
2. Bukan riba;
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
4. Tidak ada penipuan (*gharar*);
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan; dan
6. Tidak mengandung unsur judi (*maisyir*).

Jadi dalam operasional bank syariah perlu memperhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh syariat atau ajaran islam berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya

e. Konsep Produk Bank Umum Syariah

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu produk penyaluran dana, penghimpunan dana, dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya.

1. Penyaluran Dana

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

- *Ba'i Al-Murabahah*: Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan;
- *Ba'i As-salam*: Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan secara segera;
- *Ba'i Al-Istishna*: Merupakan bagian dari *ba'i as-salam* namun *ba'i al-istishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *ba'i al-Istishna* mengikuti *ba'i as-salam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

### c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip kerja sama bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

- *Musyarakah*: adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- *Mudharabah*: adalah kerja sama dua orang atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dalam perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara *musyarakah* dengan *mudharabah* adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada *musyarakah* diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada *mudharabah* modal hanya dimiliki satu pihak saja.

## 2. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, deposito. Adapun prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

### a. Prinsip *Wadiah*

Penerapan prinsip *wadiah* yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, dimana pihak yang dititipi

(bank) bertanggung jawab atas keutuhan serta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada *wadi'ah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan maka *mudharabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- *Mudharabah mutlaqah*: Prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun;
- *Mudharabah muqayyadah on balance sheet (excuting)*: Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu;
- *Mudharabah muqayyadah off balance sheet (chanelling)*: Penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank

sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

### 3. Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

#### a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

#### b. *Ijarah* (Sewa)

Kegiatan *ijarah* ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

## 2. Profitabilitas

### a. Pengertian Profitabilitas<sup>32</sup>

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas

---

<sup>32</sup>Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, hlm. 92-93.

normal bisnisnya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya.

Rasio profitabilitas dikenal dengan rasio rentabilitas. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen, oleh karena itu kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba-rugi dan/atau neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan

mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industri.

#### b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas<sup>33</sup>

Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan.

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset;

---

<sup>33</sup>Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, hlm. 227-228.

5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam total ekuitas;
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih;
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih;
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

c. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas<sup>34</sup>

Pada umumnya, penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui. Berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba:

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return On Assets*)

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih.

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

### 3. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih.

### 4. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Margin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional terhadap penjualan bersih.

### 5. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih terhadap penjualan bersih.

### d. *Return on Assets (ROA)*

*Return On Assets (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam

dalam total aset. *Return On Assets* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dalam kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya.<sup>35</sup>

*Return On Assets* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kinerja bank. Dengan memperhatikan ROA, manajemen dapat mengonsentrasikan permasalahan yang membuat bank tidak dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kemudian, dari ROA bank juga dapat meneruskan penelitian untuk mencari akar penyebab kinerja yang menurun dari bank dalam menghasilkan laba.<sup>36</sup> Maka dari itu, dalam penelitian ini rasio *Return On Assets* (ROA) digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan.

Berikut di bawah ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung profitabilitas dengan menghitung hasil pengembalian atas aset (*Return on Assets*):<sup>37</sup>

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui bahwa rasio *Return On Assets* (ROA) terdiri dari:

#### 1. Laba Bersih/Laba Setelah Pajak<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Citra Sylvia Devi, *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Kualitas Aktiva Produktif terhadap Profitabilitas Bank pada Sektor Perbankan Go Publik yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012*, Jurnal, Universitas Komputer Indonesia, 2012.

<sup>36</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 146.

<sup>37</sup>Hery, *Analisis Laporan Keuangan...*, hlm. 228.

Laba bersih/Laba setelah pajak adalah laba sebelum pajak dikurangi pajak terutang. Pajak terutang dihitung dari penghasilan kena pajak, di mana besarnya dihitung dari laba komersial atau laba sebelum pajak dikurangi atau ditambah koreksi fiskal. Pajak terutang terdapat pada laporan perhitungan hasil usaha syariah.

Laba bersih ini memberikan pengguna laporan keuangan sebuah ukuran ringkasan kinerja perusahaan secara keseluruhan selama periode berjalan (yang meliputi aktivitas utama dan aktivitas sekunder), dan setelah memperhitungkan besarnya pajak penghasilan.<sup>39</sup>

## 2. Aset<sup>40</sup>

Aset menyediakan manfaat ekonomis di masa mendatang yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi sebelumnya, aset dapat didapatkan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Pada umumnya aset dikelompokkan menjadi dua yaitu aset lancar (*current asset*) dan aset tetap (*fixed asset*). Namun, aset tak berwujud (*asset tangible*) dipisahkan menjadi aset yang berdiri sendiri.

Berkaitan dengan rasio *Return On Assets*, Bank Indonesia sendiri telah menetapkan kriteria untuk rasio ini agar dapat

---

<sup>38</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: ANDI, 2015), hlm. 331.

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Werner R. Murhadi, *Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.15.

dikategorikan sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Adapun kriterianya sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Return On Assets* (ROA)**

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,5\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/DPNP/2004

#### e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Laba bank tergantung kepada berbagai faktor, baik dari internal bank maupun eksternal bank, lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

##### 1. Faktor Internal

###### a. Efisiensi Operasional<sup>41</sup>

Menurut S. P. Hasibuan (1984;2333-4), efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber-sumber yang dipergunakan, dan hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang

---

<sup>41</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan...*, hlm. 145.

terbatas..<sup>42</sup>Sedangkan, menurut kamus besar bahasa indonesia operasional adalah berhubungan dengan operasi.

b. Strategi bisnis bank<sup>43</sup>

Strategi bisnis bank merupakan salah satu yang menjadi kunci keberhasilan sebuah bank untuk dapat terus ikut dalam persaingan global yang terus memanas dan menjadikan bank harus bergerak dinamis menyesuaikan diri dengan pergerakan persaingan yang juga semakin ketat. Nasabah sekarang ini telah menjadi kritis dan tidak seperti dulu lagi yang semata-mata hanya ingin menabung saja tanpa adanya pemeriksaan terhadap kebijakan bank.

c. Kualitas aktiva produktif<sup>44</sup>

Kualitas aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

d. Pembiayaan bermasalah<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup>Maxmonroe, *Pengertian Efisiensi: Tujuan, Manfaat, Syarat dan Contoh Efisiensi*, diakses melalui <https://www.maxmonroe.com/vid/manajemen/pengertian-efisiensi.html>, tanggal 20 Mei 2019.

<sup>43</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan...*, hlm. 145.

<sup>44</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan...*, hlm. 145.

<sup>45</sup>Ismail, MBA, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, hlm. 127.

Pembiayaan bermasalah adalah seluruh pembiayaan pada pihak ketiga bukan bank dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>46</sup>

## 2. Faktor Eksternal

### a. Kondisi Ekonomi<sup>47</sup>

Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu:

#### 1. Ekonomi Mikro

Ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga. Dalam ekonomi mikro dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum.

#### 2. Ekonomi Makro

Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain: pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang yang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional

Diantara variabel-variabel ekonomi agregatif yang banyak dipersoalkan dalam ekonomi makro antara lain:

---

<sup>46</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan ...*, hlm. 36.

<sup>47</sup>*Ibid.*

1. Tingkat pendapatan nasional;
2. Tingkat kesempatan kerja;
3. Pengeluaran konsumsi rumah tangga;
4. *Saving*;
5. Investasi;
6. Jumlah uang yang beredar;
7. Tingkat harga;
8. Tingkat bunga;
9. Neraca pembayaran;
10. Utang pemerintah.

Selain itu, masalah utama dalam analisis makro ekonomi adalah:

1. Penentuan kegiatan ekonomi;
2. Masalah-masalah dalam perekonomian;
3. Kebijakan makro ekonomi, kebijakan ini terdiri dari:
  - a. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi

terkontrol).<sup>48</sup> Untuk mencapai itu semua perlu adanya suatu instrumen kebijakan moneter.

Instrumen kebijakan moneter merupakan alat-alat atau media pengendalian operasi moneter yang dimiliki dan dapat digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi sasaran operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh bank sentral atau pemerintah (Warjiyo, 2005:14) dan (Solikin dan Suseno, 2002: 26).<sup>49</sup> Instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi 2, yaitu:

#### 1. Instrumen langsung<sup>50</sup>

Instrumen langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Instrumen langsung terdiri dari:

- Penetapan Suku Bunga;
- Pagu Pembiayaan;
- Rasio Likuiditas;
- Pembiayaan Langsung;
- Pembiayaan Rediskonto;

---

<sup>48</sup>Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, hlm. 151.

<sup>49</sup>M. Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 129.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 130.

- Instrumen lain: pengguntingan uang, pembersihan uang, penetapan uang muka impor

## 2. Instrumen tidak langsung<sup>51</sup>

Instrumen tidak langsung merupakan usaha untuk mengendalikan variabel moneter dengan cara mempengaruhi neraca untuk mengendalikan variabel moneter dengan cara mempengaruhi neraca bank sentral. Instrumen tidak langsung terdiri dari:

- Operasi Pasar Terbuka;
- Fasilitas Diskonto;
- Ketentuan Cadangan Minimum;
- Himbauan Moral.

### b. Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.<sup>52</sup>

### b. Hukum

Hukum perbankan merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>Wikipedia, *Kebijakan Fiskal*, diakses melalui [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan\\_fiskal](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan_fiskal), tanggal 21 Mei 2019.

masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank dan lain-lain yang berkenaan dengan perbankan tersebut.<sup>53</sup>

#### c. Regulasi

Regulasi bisnis dalam ilmu ekonomi adalah segala bentuk peraturan untuk mengendalikan perilaku bisnis bisa dalam bentuk pembatasan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, regulasi dalam bidang industri, peraturan asosiasi perdagangan dsb.<sup>54</sup>

#### d. Perubahan Teknologi

*Digital economy* merupakan suatu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan teknologi digital atau internet sebagai medianya dalam berbagi kegiatan baik berkomunikasi, kolaborasi maupun bekerjasama antar perusahaan ataupun individu yang dapat mendatangkan *profit* dalam perekonomian. Kegiatan tersebut salah satunya meliputi jasa bisnis perbankan. Dengan keberadaan digital ekonomi ini

---

<sup>53</sup>Dian Eka Permatasari, *Hukum Perbankan*, diakses melalui <https://www.slideshare.net/mobile/Dianekapermatasari/asas-hukum-perbankan>, tanggal 21 Mei 2019.

<sup>54</sup>Pengertian Menurut Para Ahli, *Pengertian Regulasi*, diakses melalui <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-regulasi/>, tanggal 21 Mei 2019.

daya saing produk dan jasa akan meningkat, baik di level mikro maupun makro.<sup>55</sup>

e. Persaingan

Persaingan antar bank terjadi karena perebutan sumber daya produktif, misalnya pada deposito, tabungan dan penyaluran pembiayaan yang merupakan sumber pendapatan. Beberapa upaya yang dilakukan dalam persaingan adalah dengan melakukan persaingan non-harga. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

### 3. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

a. Pengertian Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional merupakan rasio yang dapat menggambarkan kondisi efisiensi operasional dalam suatu perusahaan, perhitungannya dilakukan dengan membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Menurut kamus besar bahasa indonesia efisiensi memiliki definisi: (1) ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya); kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan. (2) kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (tidak membuang waktu, tenaga, biaya).

---

<sup>55</sup>Mutiara Annisa, *Masa Depan Industri Keuangan Perbankan*, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/kelompok5top/5a0272ae9b1e671460d033532/masa-depan-industri-keuangan-perbankan-di-era-digitalekonomi?page=all>, tanggal 21 Mei 2019

Menurut S. P. Hasibuan (1984;2333-4), efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.<sup>56</sup> Sedangkan, operasional menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berhubungan dengan operasi. Jadi dapat disimpulkan efisiensi operasional adalah ketepatan cara dalam menjalankan kegiatan operasional dengan penggunaan sumber daya yang terbatas/ yang ada, sehingga tidak membuang waktu, tenaga, biaya dan mendapatkan hasil yang optimal.

Pencapaian efisiensi operasional bertujuan agar bank yang bersangkutan dapat berjalan lebih optimal dalam melayani para nasabahnya. Dengan efisiensi yang dilakukan, sebuah bank dapat meminimalisir angka pengeluaran, dan sebaliknya memaksimalkan angka pendapatan.<sup>57</sup> Penilaian rasio ini juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya operasional agar tidak membengkak.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Maxmonroe, *Pengertian Efisiensi: Tujuan, Manfaat, Syarat dan Contoh Efisiensi*, diakses melalui <https://www.maxmonroe.com/vid/manajemen/pengertian-efisiensi.html>, tanggal 20 Mei 2019.

<sup>57</sup>Ahli Perbankan, *Mengelola Efisiensi Operasi Bank*, diakses melalui <https://ahliperbankan.com/mengelola-efisiensi-operasi-bank/>, tanggal 22 April 2019.

<sup>58</sup>El Heze, *Cara Menghitung Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*, diakses melalui <https://www.sahamgain.com/2018/04/cara-menghitung-rasio-biaya-operasional.html>, tanggal 22 April 2019.

Semakin besar nilai rasio BOPO, maka semakin tidak efisien manajemen bank dalam mengelola biaya operasionalnya. Selain itu, rasio BOPO yang cenderung terus meningkat, juga mengindikasikan manajemen dalam suatu bank tidak mampu memaksimalkan pendapatan yang diperoleh. Berikut di bawah ini adalah rumus menghitung rasio BOPO:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Berkaitan dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Bank Indonesia sendiri telah menetapkan kriteria untuk rasio ini agar dapat dikategorikan sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Adapun kriterianya sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Matriks Kriteria Penetapan peringkat Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Sehat	Tingkat efisiensi sangat baik (rasio BOPO kurang dari 83%)
2	Sehat	Tingkat efisiensi baik (rasio BOPO berkisar diantara 83% sampai dengan 85 %)
3	Cukup Sehat	Tingkat efisiensi cukup baik (rasio BOPO berkisar antara 85% sampai dengan 87%)
4	Kurang Sehat	Tingkat efisiensi kurang sehat (rasio BOPO berkisar antara 87% sampai

		dengan 89%)
5	Tidak Sehat	Tingkat efisiensi sangat buruk (rasio di atas 89%)

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/ DPNP tahun 2011

## b. Biaya Operasional

### 1. Pengertian Biaya Operasional

Biaya Operasional (*operating expense*) secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu “biaya” dan “operasional”. Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut.<sup>59</sup> Sedangkan operasional menurut kamus besar bahasa indonesia adalah secara (bersifat) operasi; berhubungan dengan operasi. Jadi, biaya operasional (*operating expense*) dapat didefinisikan sebagai seluruh pengorbanan yang dikeluarkan/pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

### 2. Penggolongan Biaya Operasional<sup>60</sup>

Menurut Supriyono (2004) biaya operasional dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu:

<sup>59</sup>Muchlisin Riadi, *Pengertian dan Jenis-jenis Biaya*, diakses melalui <https://www.kajianpustaka.com/2015/03/pengertian-dan-jenis-jenis-biaya.html>, tanggal 18 Mei 2019.

<sup>60</sup>Anang Panca, *Pengertian dan Klarifikasi Biaya Operasional*, diakses melalui <https://harga.web.id/pengertian-dan-klarifikasi-biaya-operasional.info>, tanggal 19 Mei 2019.

- a. Biaya langsung (*direct cost*), adalah biaya yang terjadi atau manfaatnya dapat diidentifikasi kepada objek atau pusat biaya tertentu;
  - b. Biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasi pada objek atau pusat biaya tertentu, atau biaya yang manfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya.
3. Biaya Operasional Bank Syariah
- a. Biaya Operasional<sup>61</sup>
    1. Biaya bagi hasil;
    2. Biaya gaji;
    3. Biaya kerugian piutang;
    4. Biaya ATK;
    5. Biaya transportasi;
    6. Biaya kantor;
    7. Biaya organisasi;
    8. Biaya iklan;
    9. Biaya pengembangan.
  - b. Biaya Operasional Lainnya<sup>62</sup>
    1. Pembatalan transaksi murabahah oleh mitra usaha dan mitra usaha telah menyetorkan urbun, maka “biaya terkait” yang

---

<sup>61</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntans*, hlm. 328.

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 329.

telah dikeluarkan LKS atau Bank Syariah dipembiayaan kembali;

2. Koreksi kelebihan penyisihan kerugian aktiva produktif.

### c. Pendapatan Operasional

#### 1. Pengertian Pendapatan Operasional<sup>63</sup>

Pendapatan Operasional (*operating income*) atau laba operasional (*operating profit*) dapat digunakan untuk mengukur kinerja fundamental operasi perusahaan dan dihitung sebagai selisih antara laba kotor dengan biaya operasional. Pendapatan operasional ini menggambarkan bagaimana aktivitas operasi perusahaan telah dijalankan dan dikelola secara baik dan efisien, terlepas dari kebijakan pembiayaan dan pengelolaan pajak penghasilan.

#### 2. Pendapatan Operasional Bank Syariah

##### a. Pendapatan Operasional Utama

Pendapatan operasi utama pada Laporan Perhitungan Usaha Syariah, antara lain:

##### 1. Pendapatan dari jual beli

Pendapatan jual beli pada LKS atau Bank Syariah dapat berupa:

- Margin *Murabahah*;
- Keuntungan *Salam*;

---

<sup>63</sup>Hery, *Analisis Laporan Keuangan...*, hlm.48.

- Margin *Istishna*;

## 2. Pendapatan Bersih Sewa

Berbagai pendapatan sewa, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Pendapatan *ijarah*;
- Pendapatan *ijarah* lanjut;
- IMBT

Pendapatan bersih sewa adalah penghasilan yang terkait dengan pemanfaatan aktiva *ijarah*, terdiri dari:

- Pendapatan sewa;
- Keuntungan pelepasan aktiva *ijarah*;
- Keuntungan lainnya.

Penghasilan tersebut kemudian dikurangi dengan beban pengelolaan aktiva *ijarah*, diantaranya:

- Beban penyusutan aktiva *ijarah*;
- Beban pemeliharaan aktiva *ijarah*;
- Beban sewa *ijarah* aktiva yang berasal dari transaksi sewa dan penyewaan kembali;
- Kerugian pelepasan aktiva *ijarah*.

## 3. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil, dapat berkaitan dengan:

- a. Pendapatan bagi hasil *mudharabah mutlaqah*;
- b. Pendapatan bagi hasil *musyarakah*.

Pendapatan bagi hasil diakui pada saat menerima laporan periodik oleh *mudharib* atau pengelola dana/usaha.

Pendapatan dari bagi hasil dikurangi dengan kerugian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang bukan karena kesalahan LKS atau Bank Syariah.

b. Pendapatan Operasi Utama Lainnya

Pendapatan operasional lainnya, antara lain pendapatan penyelenggaraan jasa berbasis imbalan. Pendapatan operasional lainnya akan diperhitungkan dengan beban operasi lainnya.

Pendapatan operasi utama lainnya, antara lain berasal dari:

1. Pendapatan dari pinjaman *Qardh* (administrasi, kelebihan *Qardh*);
2. Pendapatan penempatan dana pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya (jasa investasi terikat).
3. Pendapatan imbalan jasa perbankan, seperti:
  - a. Pendapatan *fee rahn*;
  - b. Pendapatan *fee* jasa-jasa;
  - c. Pendapatan *fee* lainnya;
  - d. Pendapatan administrasi;
  - e. Pendapatan transaksi valuta asing.

#### d. Tujuan Efisiensi Operasional<sup>64</sup>

Secara umum tujuan efisiensi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan;
2. Untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan;
3. Untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki sehingga tidak ada yang terbuang percuma;
4. Untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga *output*-nya semakin maksimal;
5. Untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.

#### e. Faktor yang Mempengaruhi Inefisiensi Operasional Bank<sup>65</sup>

1. Struktur organisasi bank yang kegemukan. Dalam arti, jajaran organisasi dalam bank tersebut cukup melebar, sehingga dalam hal pembiayaan operasionalnya juga turut membengkak. Untuk menanggulangnya, jajaran manajemen bank harus dapat lebih merampingkan pada struktur organisasinya;
2. Komposisi unit bisnis dengan unit non bisnis kurang proporsional. Hal itu hanya akan menyebabkan pemborosan dalam operasional bank secara keseluruhan atau komprehensif;

---

<sup>64</sup>Maxmonroe, *Pengertian Efisiensi: Tujuan, Manfaat, Syarat dan Contoh Efisiensi*, diakses melalui <https://www.maxmonroe.com/vid/manajemen/pengertian-efisiensi.html>, tanggal 20 Mei 2019.

<sup>65</sup>Ahli Perbankan, *Mengelola Efisiensi Operasi Bank*, diakses melalui <https://ahli perbankan.com/mengelola-efisiensi-operasi-bank/>, tanggal 22 April 2019.

3. Penunjukan pejabat yang kurang tepat. Artinya, beberapa posisi strategis dalam bank harus diduduki oleh orang-orang yang sudah terbukti *qualified*. Dengan begitu, pejabat tersebut dapat memilih kebijakan strategis bagi perkembangan yang tepat. Singkirkan praktik-praktik kolusi dan nepotisme dalam hal penunjukan posisi strategis seperti itu karena berkaitan dengan masa depan bank;
4. Kualitas sumber daya manusia yang dibawah rata-rata. Sebuah bank yang ingin berkembang dengan melakukan efisiensi operasionalnya membutuhkan orang-orang yang berkualitas. Mereka harus sudah siap saat berada di posisi tertentu dalam organisasi bank. Pelatihan dan pembelajaran rutin harus selalu dilakukan untuk sumber daya manusia tersebut. Dengan tujuan, mereka dapat mengelola efisiensi operasi bank dengan baik dan seperti yang diharapkan;
5. Pejabat bank yang sering melakukan kegiatan di luar pekerjaan, tetapi masih menggunakan fasilitas perusahaan. Hal itu hanya akan membuat pemborosan dalam pembiayaan operasionalnya. Jika terkait pekerjaan sehari-hari, tidak masalah menggunakan fasilitas perusahaan. Berbeda jika berkaitan dengan urusan pribadi, tetapi masih menggunakan fasilitas perusahaan. Untuk menanggulangnya, pihak manajemen harus mengeluarkan kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan hal tersebut, jika tidak mau mengalami pemborosan yang berlarut-larut.

#### 4. *Non Performing Financing (NPF)*

##### a. Pengertian *Non Performing Financing (NPF)*

*Non Performing Financing (NPF)* adalah pembiayaan-pembiayaan yang tidak memiliki *performance* yang baik dan diklasifikasikan menjadi kurang lancar, diragukan dan macet. Perhitungan rasio *Non Performing Financing (NPF)* dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah pembiayaan yang termasuk pada kategori kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan yang telah diberikan bank.<sup>66</sup>

Semakin tinggi nilai rasio NPF, itu berarti semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah atau kualitas pembiayaan yang ada di bank tersebut rendah. Menurut regulator batas maksimum rasio NPF adalah 5%.

Adapun rumus melakukan penghitungan rasio ini adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

##### b. Pembiayaan

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan kebutuhan pihak yang bersangkutan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

---

<sup>66</sup>Maidalena, *Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah*, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2014, hlm. 132.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang sudah disepakati di awal akad.

Sedangkan arti pembiayaan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dengan bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari'ah dan/Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

#### c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

### 1. Tujuan secara makro<sup>67</sup>

- Peningkatan ekonomi umat;
- Tersedianya dana bagi peningkatan usaha;
- Meningkatkan produktivitas;
- Membuka lapangan kerja;
- Terjadi distribusi pendapatan.

### 2. Tujuan secara mikro<sup>68</sup>

- Upaya mengoptimalkan laba;
- Upaya meminimalkan risiko,;
- Pendayagunaan sumber ekonomi;
- Penyaluran kelebihan dana.

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakn perbankan syar'ah terkait dengan *stakeholder*, yaitu:<sup>69</sup>

#### 1. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

#### 2. Karyawan

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

#### 3. Masyarakat

---

<sup>67</sup>Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 682.

<sup>69</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 303.

a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b. Debitur

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan) konsumtif.

c. Masyarakat umumnya-konsumen

Masyarakat dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4. Pemerintah

Karena penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu kan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluar jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya

#### d. Pembiayaan Bermasalah<sup>70</sup>

Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah:

1. Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank;
2. Pembiayaan yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas;
3. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bagi hasil;
4. Pembiayaan di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali pembiayaan, sehingga belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh bank;
5. Pembiayaan di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas;
6. Memiliki kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi biaya nasabah yang bersangkutan;
7. Pembiayaan golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

---

<sup>70</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, hlm. 206.

e. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah<sup>71</sup>

Pembiayaan *non-performing financing* merupakan pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Pembiayaan kurang lancar, merupakan pembiayaan yang telah mengalami tunggakan. Yang tergolong pembiayaan kurang lancar apabila:
  - a. Pengembalian pokok pinjaman dan keuntungan telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari;
  - b. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk;
  - c. Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.
2. Pembiayaan diragukan, merupakan pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau keuntungan. Yang tergolong pembiayaan yang diragukan apabila:
  - a. Penundaan pembayaran pokok dan/atau antara 180 hingga 270 hari;
  - b. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk;
  - c. Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

---

<sup>71</sup>Ismail, MBA, *Manajemen Perbankan*, hlm. 123-125.

3. Pembiayaan macet, merupakan pembiayaan yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan macet tersebut.

f. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

1. Faktor Internal Bank<sup>72</sup>

- Kepentingan pribadi pejabat bank terkait dengan pemberian pembiayaan kepada debitur (*self dealing*), seperti keterlibatan dalam kegiatan usaha nasabah;
- Haus akan laba (*anxiety for income*), namun kurang mengupayakan sumber pengembalian, yaitu arus kas;
- Kompromi terhadap prinsip pemberian pembiayaan yang sehat (tidak objektif);
- Kebijakan/prosedur pembiayaan tidak memadai/tidak memenuhi dalam pelaksanaan aktivitas pembiayaan yang baik;
- Informasi pembiayaan untuk pengambilan keputusan tidak lengkap;
- Lambat mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian;
- *Monitoring* pembiayaan tidak memadai/tidak memenuhi dalam pelaksanaan aktivitas pembiayaan yang baik;
- Kemampuan teknis yang kurang memadai, termasuk melakukan seleksi atas risiko yang kurang andal, dan pembiayaan yang diberikan *overfacilities*;

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

- Tekanan persaingan usaha;
- Tidak adanya standar kebijakan pembiayaan;
- Pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian pembiayaan bagi satu debitur;
- Konsentrasi pembiayaan pada segmen usaha yang tergolong berisiko tinggi dan spekulatif;
- Ketidaklengkapan dokumen pembiayaan;
- Tidak ada standar formal tentang *pricing procedure*;
- Lemahnya analisis, *review*, dan pengawasan (*monitoring*) pembiayaan.

## 2. Faktor Eksternal Bank

### a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh debitur.<sup>73</sup>

1. Debitur sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena debitur tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya;
2. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja;
3. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan

---

<sup>73</sup>Ismail. MBA, *Manajemen Perbankan*, hlm. 126.

pembiayaan, disebutkan pembiayaan untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

b. Unsur ketidaksengajaan.<sup>74</sup>

1. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran, kemampuan perusahaan terbatas disebabkan karena<sup>75</sup>:

- *Supply risk*, proses produksi terhambat karena debitur mengalami kekurangan bahan baku.
- *Production risk*, risiko yang terjadi karena gangguan dalam aktivitas produksi, seperti kerusakan mesin, gangguan pencadangan listrik, dan sebagainya yang menyebabkan aktivitas produksi yang dijalankan oleh debitur terganggu dan tidak memenuhi target produksi sesuai kapasitasnya. Alhasil, kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya menurun;
- *Labour risk*, risiko yang terjadi apabila tenaga kerja perusahaan debitur melakukan pemogokan atau demonstrasi sehingga mempengaruhi operasional perusahaan;

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (PT. Gramedia Pustaka: Jakarta, 2016), hlm. 83.

- *Demand risk*, risiko yang terjadi apabila *output* (barang/produk) hasil produksi ternyata tidak laku di pasaran karena ketinggalan inovasi, hasil produksi cacat dan sebagainya;
  - *Collection risk*, risiko yang terjadi karena debitur mengalami kendala dalam melakukan penagihan piutang usaha kepada *customer*-nya.
2. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga *volume* penjualan menurun dan perusahaan rugi;<sup>76</sup>
  3. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur;<sup>77</sup>
  4. Bencana alam yang dapat merugikan debitur.<sup>78</sup>

g. Dampak Pembiayaan Bermasalah<sup>79</sup>

1. Laba/Rugi bank menurun, penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bagi hasil dan margin pembiayaan;
2. *Bad Debt Ratio* menjadi lebih rendah, Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah;
3. Biaya pencadangan penghapusan pembiayaan meningkat, bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan pembiayaan akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank;

---

<sup>76</sup>Ismail, MBA, *Manajemen Perbankan*, hlm. 126.

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 127.

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>Ismail, MBA, *Manajemen Perbankan*, hlm. 127.

4. ROA maupun ROE menurun, penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena *return* turun, maka ROA dan ROE menurun.

## 5. Inflasi

### a. Pengertian Inflasi<sup>80</sup>

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dalam pengertian yang lain, inflasi merupakan presentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga. Ada barang atau jasa yang harganya turun. Namun ada juga barang atau jasa yang harganya tetap (Ensiklopedia Indikator Sosial Ekonomi Edisi 1 2011).

Sementara itu, Nopirin (1990:17) mengatakan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus, jadi inflasi tidak berarti bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat dalam presentase yang sama. Menurut Boediono (2001) mengatakan inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan kenaikannya secara terus menerus. Definisi ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Suseno dan Astiyah (2009:3) inflasi adalah suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus.

---

<sup>80</sup>M. Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*, hlm. 253-254.

Berdasarkan beberapa definisi inflasi tersebut, ada tiga aspek yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu:

1. Kecenderungan Kenaikan Harga-harga

Inflasi memiliki makna adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga dibandingkan dengan tingkat harga sebelumnya, tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan periode sebelumnya, tapi tetap dalam kecenderungan yang meningkat.

2. Bersifat Umum

Jika kenaikan harga hanya berlaku pada satu komoditi dan kenaikan itu tidak akan mendorong naiknya harga-harga komoditi lainnya, maka gejala ini tidak dapat disebut sebagai inflasi karena kenaikan harga tersebut tidak bersifat umum. Tetapi jika pemerintah menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka hampir bisa dipastikan bahwa harga-harga komoditas lainnya akan ikut naik. Artinya, dengan naiknya harga BBM maka tarif angkutan akan naik yang pada gilirannya akan mendorong naiknya biaya produksi yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga-harga barang/jasa lainnya.

3. Berlangsung Secara Terus Menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum belum bisa dikatakan sebagai gejala inflasi. Jika hanya terjadi sesaat, misalnya hari ini terjadi kenaikan harga dibandingkan hari sebelumnya, tapi keesokan

harinya harga kembali turun pada tingkat semula. Untuk alasan itu, maka perhitungan inflasi biasanya dalam rentang waktu satu bulan, triwulan, semester dan tahunan.

b. Metode Menghitung Inflasi<sup>81</sup>

Hitungan perubahan harga tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan istilah Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI). Presentase kenaikan IHK dinamakan inflasi, sedangkan penurunannya dinamakan deflasi.

IHK adalah suatu indeks yang mengitung rerata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk (rumah tangga) dalam kurun waktu tertentu.

Inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cara menghitung perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa IHK merupakan nilai indeks yang mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Jika IHK pada saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka dikatakan bahwa terjadi kenaikan tingkat harga umum (inflasi). Jika terjadi sebaliknya, maka disebut terjadi penurunan tingkat harga umum:

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 264-266.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah sebagai berikut:

$$INF_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100$$

$INF_n$ : inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun) (n)

$IHK_n$ : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n)

$IHK_{n-1}$ : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)

Interpretasi terhadap hasil perhitungan inflasi ( $INF_n$ ) adalah:

- $INF_n < 0$ : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n-1). Keadaan ini disebut sebagai deflasi.
- $INF_n = 0$ : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n-1). Keadaan ini disebut sebagai stabilitas harga.
- $INF_n > 0$ : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami peningkatan dibandingkan pada waktu (bulan atau tahun) (n-1). Keadaan ini disebut sebagai inflasi.

### c. Dampak Inflasi

Bank Sentral (Bank Indonesia) memandang penting terciptanya kestabilan harga, karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan

dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain:<sup>82</sup>

1. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun dan akhirnya semua orang, khususnya orang miskin akan bertambah miskin;
2. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainly*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menuunkan pertumbuhan ekonomi;
3. Tingkat inflasi domestik yang tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di manca negara (negara tetangga) akan menyebabkan tingkat bunga riil domestik menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:<sup>83</sup>

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dan pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari

---

<sup>82</sup>M. Natsir, *Ekonomi Moneter*, hlm. 255.

<sup>83</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 139. Dikutip dari Rafiq al-Masri; *a paper submitted in the Second Workshop on Inflation: Inflation and its Impact on Societies-The Islamic Solution*; Kuala Lumpur 1996.

uang dan aset keuangan akibat dari biaya inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain *'self feeding inflation'*;

2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal to Propensity to Save*);
3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *Marginal Propensity to Consume*);
4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi dan lainnya.

#### d. Jenis-jenis Inflasi

##### 1. Inflasi Karena Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)<sup>84</sup>

Inflasi karena tarikan permintaan adalah kenaikan harga-harga yang timbul sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka panjang. Tekanan inflasi dari sisi permintaan akan terjadi jika permintaan agregat berbeda dengan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa untuk konsumsi dan investasi dalam

---

<sup>84</sup>M. Natsir, *Ekonomi Moneter*, hlm. 256.

suatu perekonomian. Jumlah tersebut digambarkan oleh PDB perekonomian.

Sementara itu, penawaran agregat adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh suatu perekonomian untuk dapat memenuhi permintaan agregat (Suseno dan Astiyah, 2009).

## 2. Inflasi Karena Dorongan Biaya (*Cost Push Inflation*)<sup>85</sup>

Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, produsen harus menaikkan harga supaya mendapatkan keuntungan (laba) dan kegiatan produksi bisa berlanjut terus dalam jangka panjang (*Sustainable*).

## 3. Inflasi Karena Tingginya Peredaran Uang<sup>86</sup>

Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat dua kali lipat. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, dimana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun hal tersebut membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah dan mengakibatkan inflasi.

## 4. Inflasi Secara Umum, terdiri dari:<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, hlm. 258.

<sup>86</sup>Maxmanroe, Pengertian Inflasi, diakses melalui <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-inflasi.html>, tanggal 21 April 2019.

<sup>87</sup>M. Natsir, *Ekonomi Moneter*, hlm. 261.

- a. Inflasi IHK atau inflasi umum (*headline inflation*) adalah inflasi seluruh barang dan jasa yang dimonitor harganya secara periodik. Merupakan gabungan dari inflasi inti, inflasi harga administrasi dan inflasi gejala barang (*volatile goods*).
  - b. Inflasi inti (*core inflation*) adalah inflasi barang dan jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (faktor-faktor fundamental misalnya ekspektasi inflasi, nilai tukar dan keseimbangan permintaan dan penawaran) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum yang sifatnya cenderung permanen dan persisten.
  - c. Inflasi harga administrasi (*administered price inflation*) adalah inflasi yang harganya diatur oleh pemerintah terjadi karena campur tangan pemerintah, misalnya kenaikan harga BBM, kenaikan TDL, angkutan dalam kota dan kenaikan tarif tol serta PHS untuk beberapa komoditas.
  - d. Inflasi gejala barang-barang (*volatile goods inflation*) adalah inflasi kelompok komoditas (barang dan jasa) yang perkembangan harganya sangat bergejolak.
5. Inflasi Berdasarkan Asalnya, yaitu:<sup>88</sup>
- a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi barang dan jasa secara umum di dalam negeri;

---

<sup>88</sup>*Ibid.*, hlm. 262.

- b. Inflasi yang berasal dari manca negara adalah inflasi barang dan jasa (barang dan jasa yang diimpor) secara umum di luar negeri.
6. Inflasi Berdasarkan Pengaruhnya, terdiri dari:<sup>89</sup>
- a. Inflasi tertutup (*closed inflation*) adalah inflasi yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau beberapa barang tertentu;
  - b. Inflasi terbuka (*open inflation*) adalah inflasi yang terjadi pada semua barang dan jasa secara umum.
7. Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahannya<sup>90</sup>
- a. Inflasi ringan adalah inflasi yang besarnya <10% per tahun.
  - b. Inflasi sedang adalah inflasi yang besarnya antara 10%-30% per tahun.
  - c. Inflasi berat adalah inflasi yang besarnya antara 30%-100% per tahun.
  - d. Inflasi hiper adalah inflasi yang besarnya > 100% per tahun.

## 6. Suku Bunga Acuan Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki kebijakan yang dilakukan dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar atau yang dikenal dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan dan mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang yang beredar.

---

<sup>89</sup>*Ibid.*

<sup>90</sup>*Ibid.*

Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol).<sup>91</sup>

Jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang yang beredar, maka kebijakan yang diambil adalah kebijakan ekspansif, sedangkan jika yang dilakukan adalah mengurangi jumlah uang yang beredar, maka kebijakan yang diambil adalah kebijakan kontraktif (Rahardja Manurung, 2002).

Dalam pengendalian harga atau menekan laju inflasi, otoritas moneter dapat mengambil langkah-langkah dibidang moneter. Kebijakan yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan mengatur tingkat suku bunga atau menetapkan suku bunga.<sup>92</sup>

Suku bunga yang dimaksud adalah suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate-BI 7 Days Repo Rate*). Secara operasional, *stance* kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (*BI Rate-BI 7 Days Repo Rate*) yang diharapkan akan mempengaruhi suku bunga pasar uang, suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.<sup>93</sup> Suku Bunga ini ditetapkan setiap bulan melalui rapat anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

---

<sup>91</sup>Naf'an, *Tinjauan Ekonomi Syariah*, hlm. 151.

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 152.

<sup>93</sup>M. Natsir, *Ekonomi Moneter*, hlm. 158.

Suku bunga ini merupakan biangnya suku bunga. Semua suku bunga yang ada, dari deposito, sampai *yield* obligasi, akan mengacu pada *BI Rate-BI 7 Days Repo Rate*.<sup>94</sup>

Karena suku bunga ini diperuntukkan sebagai suku bunga acuan bank-bank lain, maka ketika Suku Bunga Acuan Bank Indonesia mengalami kenaikan, itu akan diikuti dengan kenaikan suku bunga di perbankan, baik bunga simpanan dan pembiayaan perbankan.

Kenaikan suku bunga ini diharapkan dapat menambah minat masyarakat dalam menyimpan uangnya diperbankan, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan tingkat inflasi.

Sebelum tanggal 19 Agustus 2016 Bank Indonesia memiliki *BI Rate* sebagai suku bunga acuan. Hingga pada tanggal 19 Agustus 2016 formula tersebut diubah menjadi *BI 7 Days Repo Rate*, BI tidak mengubah tingkat suku bunga melainkan mengubah tenor suku bunga kebijakan *BI Rate* yang bertenor 360 hari menjadi 7 hari. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter, sehingga setiap ada suku bunga baik kenaikan maupun penurunan, dampaknya terhadap suku bunga pasar dan perbankan, baik deposito ataupun pembiayaan akan cepat membaik.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, hlm. 104.

<sup>95</sup>Rahma Wiyanti, *Analisis Pengaruh 7 Days Rate Repo, Inflasi, Nilai Tukar dan PDB Terhadap IHSG Sektor Properti (Studi Empiris)*, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, Juli 2018, hlm. 100.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari hasil kajian pustaka penulis, menemukan ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, rasio *Non Performing Financing*, Inflasi dan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia. Berikut dibawah ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel 2. 3**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Seliaty Bunga Paretta <sup>96</sup>	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Inflasi Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum syariah di Indonesia Periode 2011-2015.	Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.	Periode penelitian.  Menggunakan analisis regresi linear berganda.  Terdapat variabel Dana Pihak Ketiga sebagai variabel dependen.  Tidak terdapat variabel NPF,

<sup>96</sup>Seliaty Bunga Paretta, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga*, hlm. 7

				BOPO dan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia.
2.	Lia Komala <sup>97</sup>	Pengaruh Kecukupan Modal, BOPO, Likuiditas dan <i>Size</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Kecukupan modal, BOPO, Likuiditas dan <i>Size</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.	<p>Periode penelitian.</p> <p>Jumlah sampel penelitian.</p> <p>Terdapat variabel Kecukupan modal, Likuiditas dan <i>Size</i> sebagai variable dependen.</p> <p>Menggunakan analisis regresi linear berganda.</p> <p>Tidak terdapat variabel Inflasi dan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia.</p>
3.	Ainissa Nurul Safitri <sup>98</sup>	Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan DPK	Variabel CAR dan DPK berpengaruh	<p>Periode penelitian.</p> <p>Jumlah</p>

<sup>97</sup>Lia Komala, *Pengaruh Kecukupan*, hlm. 13.

<sup>98</sup>Ainissa Nurul Safitri, *Pengaruh CAR*, hlm. 93.

		Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016	positif signifikan terhadap ROA, NPF dan FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA.	sampel penelitian . Terdapat variabel CAR, FDR dan DPK. Tidak terdapat variabel Inflasi dan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia.
4.	Labbaika Dwi Ayu Rahmawati <sup>99</sup>	Analisis Pengaruh Suku Bunga, CAR, FDR, NPF dan <i>Size</i> Terhadap ROA BUS (Studi empiris yang terdaftar di BEI periode 2012-2016).	Suku Bunga, FDR, <i>Size</i> berpengaruh terhadap ROA, sementara itu CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA BUS.	Periode penelitian. Jumlah sampel penelitian. Terdapat CAR, FDR dan <i>Size</i> . Menggunakan analisis linear berganda. Tidak terdapat BOPO dan Inflasi.
5.	Sekar Cahyani Arumdalu <sup>100</sup>	Analisis Pengaruh Inflasi BI <i>Rate</i> , Kurs dan	Inflasi berpengaruh positif signifikan,	Periode Penelitian. Jumlah

<sup>99</sup>Labbaika Dwi Ayu Rahmawati, *Analisis Pengaruh*, hlm. 11.

<sup>100</sup>Sekar Cahyani Arumdalu, *Analisis Pengaruh Inflasi*, hlm. 7.

		Produk Domestik Bruto Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.	Suku Bunga berpengaruh negatif signifikan, Kurs dan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	sampel penelitian.  Tidak menggunakan variabel NPF dan BOPO sebagai variabel independen.
6.	Dimas Purwaningtyas Kusuma <sup>101</sup>	Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Periode 2011-2015).	CAR berpengaruh positif signifikan, BOPO berpengaruh negatif signifikan, NPF, FDR, Suku Bunga dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.	Periode Penelitian.  Jumlah sampel penelitian.  Menggunakan analisis regresi linear berganda.
7.	Rihfenti Ernayani, Nadi hernadi Moorrcy & Sukimin <sup>102</sup>	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi <i>Return On Assets</i> (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2016).	Inflasi tidak berpengaruh signifikan, BI <i>Rate</i> berpengaruh negatif signifikan, Nilai Tukar Valuta Asing berpengaruh dan CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan.	Periode penelitian.  Jumlah sampel penelitian.  Menggunakan analisis regresi linear berganda.  Tidak menggunakan

<sup>101</sup>Dimas Purwaningtyas, *Analisis pengaruh Suku Bunga*, hlm. 74.

<sup>102</sup>Rihfenti Ernayani, Nadi hernadi Moorrcy & Sukimin, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Return*, Prosiding, hlm. 290.

				variabel NPF dan BOPO sebagai variabel dependen.
6.	Afifah Dian Kusuma <sup>103</sup>	Pengaruh Inflasi, BI <i>Rate</i> , Nilai Tukar Mata Uang, CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas BUS di Indonesia.	CAR, NPF, FDR berpengaruh signifikan, sedangkan Inflasi, BI <i>Rate</i> dan nilai tukar mata uang tidak berpengaruh terhadap ROA BUS.	Periode penelitian.  Menggunakan analisis regresi linear berganda.  Tidak menggunakan BOPO sebagai variabel independen.

Pada penelitian-penelitian diatas terdapat persamaan dalam pembahasan mengenai BOPO, NPF, Inflasi dan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia. Dan pada penelitian diatas menggunakan metode penelitian kuantitatif.

### C. Kerangka Pemikiran

Kondisi suatu laba dalam perbankan sangatlah penting untuk diperhatikan. Karena kualitas laba menjadi tolak ukur utama menilai kinerja manajemen dalam mengendalikan bank. Selain itu, karena ketika bank berhasil memperoleh memperoleh tingkat laba yang baik, bank dapat mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk pengembangan operasional menunjang pertumbuhan aset dan memperbesar kemampuan permodalan.

<sup>103</sup>Afifah Dian Kusuma, *Pengaruh Inflasi*, hlm. 52.

Dengan demikian ketika kualitas laba dari sebuah perbankan baik maka para deposan bank sebagai sumber dana bank akan mempunyai rasa aman yang lebih tinggi berhubungan bisnis dengan bank dan pemegang saham memperoleh imbal hasil sesuai dengan harapan melalui deviden atau *capital gain*.<sup>104</sup> Kondisi kualitas laba, sehat tidaknya dapat diketahui dengan menghitung rasio profitabilitas yaitu rasio *Return On Assets* (ROA).

Berbagai faktor dapat mempengaruhi kondisi suatu laba, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal ini diantaranya adalah efisiensi operasional, strategi bisnis bank, kualitas aktiva produktif dan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).<sup>105</sup> sedangkan faktor eksternalnya adalah kondisi ekonomi, hukum, regulasi, perubahan teknologi dan persaingan.<sup>106</sup> Karena laba dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut maka profitabilitas juga oleh faktor-faktor itu juga, sebab laba merupakan bagian dari profitabilitas.

Efisiensi operasional adalah ketepatan cara dalam menjalankan kegiatan operasional dengan penggunaan sumber daya yang terbatas/yang ada, sehingga tidak membuang waktu, tenaga, biaya dan mendapatkan hasil yang optimal. Pencapaian efisiensi operasional ini bertujuan agar bank yang bersangkutan dapat berjalan lebih optimal dalam melayani para nasabahnya.

---

<sup>104</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen*, hlm. 175.

<sup>105</sup>Ismail, MBA, *Manajemen Perbankan...*, hlm 127.

<sup>106</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Bank Berbasis Risiko*, hlm. 145.

Dengan efisiensi yang dilakukan, sebuah bank dapat meminimalisir angka pengeluaran, dan sebaliknya memaksimalkan angka pendapatan.<sup>107</sup> Efisiensi tidaknya sebuah perusahaan dalam menjalankan operasionalnya dapat tercermin dari nilai rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang berhasil diperoleh.

Pada penelitian terdahulu yang juga menguji pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia oleh Lia Komala didapatkan hasil bahwa rasio BOPO memang memiliki pengaruh negatif signifikan<sup>108</sup> terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Namun, diperiode yang sama, penelitian yang dilakukan oleh Ainissa Nurul Safitri mendapatkan hasil bahwa BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia<sup>109</sup>, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh BOPO terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Faktor internal lain yang dapat mempengaruhi kualitas laba adalah pembiayaan bermasalah . Pembiayaan bermasalah adalah seluruh pembiayaan pada pihak ketiga bukan bank dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>110</sup> Pembiayaan bermasalah ini akan menurunkan profitabilitas

---

<sup>107</sup>Ahli Perbankan, *Mengelola Efisiensi Operasi Bank*, diakses melalui <https://ahli perbankan.com/mengelola-efisiensi-operasi-bank/>, tanggal 22 April 2019.

<sup>108</sup>Lia Komala, *Pengaruh Kecukupan*, hlm. 13.

<sup>109</sup>Ainissa Nurul Safitri, *Pengaruh CAR*, hlm. 93.

<sup>110</sup>*Ibid.*, hlm. 36.

sebuah bank karena dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dari pembiayaan yang telah diberikan.<sup>111</sup>

Selain itu, pembiayaan bermasalah yang tinggi juga dapat mengurangi kemampuan bank dalam penyaluran dana kepada deposan karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar baik bagi deposan baru, maupun calon deposan sehingga akan muncul pinjaman tak tertagih (*bad debt*) yang dapat mengurangi kinerja penyaluran dana bank. Akibat dari hal tersebut aktiva menjadi tidak produktif, perputaran aktiva menjadi terhambat, yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan laba cenderung menjadi rendah.<sup>112</sup> Kondisi pembiayaan bermasalah dapat diukur dengan menghitung rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Pernyataan demikian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ainissa Nurul Safitri yang menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (2012-2016)<sup>113</sup>, namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Labbaika Dwi Ayu Rahmawati yang menyatakan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (2012-2016) yang diprosikan dengan rasio ROA<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup>Ismail, MBA, *Manajemen Perbankan...*, hlm 127.

<sup>112</sup>Cut Marlina TA Meutia Fitri, *Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga dan NPF terhadap Pertumbuhan Laba pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 249.

<sup>113</sup>Ainissa Nurul Safitri, *Pengaruh CAR*, hlm. 99.

<sup>114</sup>Labbaika Dwi Ayu Rahmawati, *Analisis Pengaruh*, hlm. 11.

Kondisi profitabilitas atau laba tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, melainkan juga oleh faktor eksternal. Adapun faktor eksternal yang dimaksud dapat berupa kondisi ekonomi, baik kondisi ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Variabel ekonomi yang dipelajari dalam ekonomi makro salah satunya adalah laju inflasi.<sup>115</sup>

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Menurut para ekonom islam, inflasi berakibat sangat buruk terhadap perekonomian, salah satunya karena akan melemahkan semangat menabung.<sup>116</sup> Tentu ini patut menjadi perhatian karena jika keinginan menabung masyarakat di bank berkurang, jumlah DPK yang terhimpun pun juga akan berkurang, sedangkan jumlah DPK merupakan hal yang penting bagi sebuah bank, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tria Kristanti, didapatkan kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Artinya penghimpunan dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan profitabilitas suatu bank, sebab volume dana yang dapat terhimpun akan menentukan pula volume dana yang dapat disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan.<sup>117</sup>

Disisi lain, kondisi perekonomian berupa inflasi dapat berpengaruh terhadap ROA juga karena inflasi bisa merubah kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajiban keuangan. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Seliaty Bunga Paretta, dari penelitiannya

---

<sup>115</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro*, hlm. 15.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>117</sup> Tria Kristanti, *Pengaruh Simpanan Dana*, hlm. 80.

didapatkan hasil bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (2011-2015).<sup>118</sup>

Namun, hasil penelitian Seliaty Bunga Paretta ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekar Cahyani Arumdalu , yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (2011-2015)<sup>119</sup> dan bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas Purwaningtyas Kusuma, yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (2011-2015) dengan arah positif.<sup>120</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat *Research Gap* pada penelitian terdahulu.

Masalah utama lainnya dalam analisis ekonomi makro adalah kebijakan makro ekonomi.<sup>121</sup> Kebijakan ini terdiri dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menetapkan tingkat suku bunga, yaitu dengan menetapkan suku bunga acuan/kebijakan yang penetapannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, suku bunga ini dikenal dengan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia.

Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (*BI Rate-BI 7 days repo rate*) merupakan salah satu dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam upaya menekan angka inflasi. Suku bunga ini pada

---

<sup>118</sup>Seliaty Bunga Paretta, *Pengaruh Dana Pihak*, hlm. 8.

<sup>119</sup>Sekar Cahyani Arumdalu, *Analisis Pengaruh Inflasi*, hlm. 7.

<sup>120</sup>Dimas Purwaningtyas Kusuma, *Analisis Pengaruh Suku*, hlm. 75.

<sup>121</sup>Naf'an, *Ekonomi Makro...*, hlm. 17.

umumnya akan dinaikkan apabila tingkat inflasi telah melebihi sasaran, dengan harapan jumlah uang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat terkendali.

Dipenelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rihfenti Ernayani, Nadi Hernadi Moorcy & Sukimin didapatkan hasil bahwa *BI Rate* (Suku Bunga Acuan Bank Indonesia) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2016, karena kenaikan suku bunga ini dapat menurunkan DPK Perbankan Syariah.<sup>122</sup>

Ketika Suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia naik, suku bunga simpanan bank konvensional akan menyesuaikan pada kenaikan tingkat suku bunga tersebut. Kebijakan ini dapat merugikan bank syariah, karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil bukan menggunakan bunga seperti halnya bank konvensional. Sehingga, disaat kenaikan Suku Bunga Acuan Bank Indonesiaterjadi, masyarakat akan lebih memilih menabung ke perbankan konvensional dibandingkan ke perbankan syariah, karena perbankan konvensional menawarkan keuntungan yang lebih dari adanya kenaikan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia.

Kondisi demikian dapat membuat perbankan syariah kehilangan Dana Pihak Ketiga dan akan berimbas kepada kondisi profitabilitas Bank Syariah. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifah Dian Kusuma, dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa *BI*

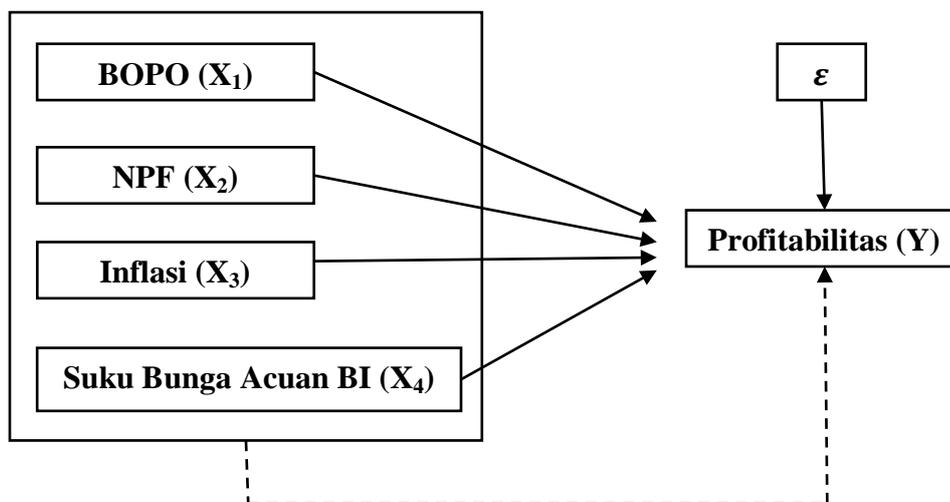
---

<sup>122</sup>Rihfenti Ernayani, Nadi Hernadi Moorcy, Sukimin, *Faktor-faktor Yang*, hlm. 290.

*Rate* (Suku Bunga Acuan Bank Indonesia) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2016 dengan arah negatif.<sup>123</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa juga terdapat *Research Gap* pada penelitian terdahulu.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2. 1**  
**Paradigma Penelitian**



<sup>123</sup> Afifah Dian Kusuma, *Pengaruh Inflasi*, hlm. 46.

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>124</sup>

Dari uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian yang akan penulis buat adalah sebagai berikut:

- Ho: BOPO, NPF, Inflasi dan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$ ) tidak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2014-2018) (Y).
- Ha: BOPO, NPF, Inflasi dan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$ ) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2014-2018) (Y).

---

<sup>124</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2017), hlm. 63.